

LAMPIRAN

A. Notulensi Wawancara dan FGD

a. FGD dengan P4MI Pemalang

Tanggal: 20 Februari 2025

Narasumber: Perdana Anggit Prasetyo (P4MI Pemalang)

Diskusi dengan P4MI Pemalang membahas kondisi penempatan awak kapal perikanan (AKP) migran serta berbagai tantangan dalam sistem pendataan dan perlindungan pekerja. Dalam pertemuan ini disampaikan bahwa hingga saat ini belum terdapat data riil mengenai jumlah AKP yang bekerja di luar negeri, karena tidak semua pekerja tercatat secara resmi dalam sistem pendataan pemerintah. Selain itu, status pekerja migran dan awak kapal perikanan juga kerap menimbulkan kebingungan akibat adanya perbedaan regulasi dan kewenangan antar lembaga.

Penempatan pekerja migran, termasuk AKP, diketahui memiliki beberapa skema, antara lain government to government (G2G), government to private (G2P), private to private (P2P), UKPS, serta jalur mandiri. Namun dalam praktiknya, tidak semua proses penempatan berjalan sesuai prosedur. Beberapa kasus menunjukkan adanya penempatan yang tidak melalui BP3MI sehingga dikategorikan sebagai penempatan non-prosedural.

Salah satu penyebab kondisi tersebut adalah dualisme regulasi dan kewenangan antara lembaga seperti Kementerian Ketenagakerjaan, BP2MI/BP3MI, dan Direktorat Jenderal Perhubungan Laut. Pada periode sebelumnya, AKP masih didata melalui sistem Kartu Tenaga Kerja Luar Negeri (KTKLN) yang dilengkapi dengan chip identitas hingga sekitar tahun 2018. Namun sistem tersebut kini telah digantikan oleh mekanisme pendataan berbasis digital.

Dalam diskusi juga disampaikan bahwa pelayanan khusus bagi AKP di wilayah Pemalang diproyeksikan baru akan berjalan secara lebih optimal pada akhir tahun 2025. Selain itu, terdapat perdebatan mengenai status hukum AKP dalam regulasi sebelumnya, apakah dikategorikan sebagai pekerja migran atau tidak. Dalam regulasi terbaru, AKP telah dimasukkan sebagai bagian dari pekerja migran Indonesia.

Konsep perlindungan pekerja migran sendiri mencakup tiga tahapan utama, yaitu perlindungan pra-penempatan, selama masa kerja, dan purna penempatan. Dalam penyelesaian permasalahan, P4MI berperan sebagai mediator hingga tahap tripartit bersama pihak terkait.

b. FGD dengan SBMI Pemalang

Tanggal: 2 Mei 2025

Narasumber: Fredy Seprizal dan Asep (SBMI Pemalang)

Wawancara dengan Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) Pemalang membahas berbagai permasalahan yang dihadapi oleh awak kapal perikanan migran, khususnya yang berasal dari wilayah Pemalang. SBMI merupakan organisasi yang bergerak dalam advokasi dan perlindungan pekerja migran, baik di sektor darat maupun laut. Namun di wilayah Pemalang, kegiatan organisasi lebih banyak berfokus pada isu awak kapal perikanan karena daerah tersebut dikenal sebagai salah satu pusat bisnis penyaluran tenaga kerja pelaut.

Menurut narasumber, di wilayah Pemalang terdapat sekitar 25 *manning agency* yang beroperasi dalam proses perekrutan awak kapal perikanan untuk bekerja di luar negeri. Keberadaan perusahaan-perusahaan tersebut menjadikan Pemalang sebagai salah satu daerah kantong pekerja migran sektor perikanan. Meskipun demikian, dalam praktiknya tidak semua perusahaan menjalankan proses perekrutan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. SBMI sering menerima laporan mengenai berbagai bentuk pelanggaran yang dialami oleh awak kapal perikanan migran. Beberapa di antaranya meliputi penahanan gaji, penahanan dokumen pribadi, serta pemutusan kontrak kerja secara sepihak oleh perusahaan penempatan. Dalam beberapa kasus, pekerja yang telah diberangkatkan ke luar negeri juga menghadapi situasi di mana perusahaan penempatan di Indonesia sudah tidak beroperasi lagi atau pemilik perusahaan tidak dapat ditemukan, sehingga proses penuntutan hak menjadi sulit dilakukan. Selain permasalahan administratif, kondisi kerja di kapal juga menjadi perhatian utama. Berdasarkan pengalaman salah satu narasumber yang pernah bekerja sebagai awak kapal perikanan, jam kerja di kapal dapat mencapai hingga 20 jam per hari dengan waktu

istirahat yang sangat terbatas. Kondisi makanan yang kurang layak serta keterbatasan akses komunikasi dengan keluarga juga menjadi tantangan yang sering dihadapi oleh pekerja.

Dalam hal perekrutan, SBMI juga menyoroti semakin maraknya penggunaan media sosial sebagai sarana promosi pekerjaan bagi calon awak kapal. Informasi yang beredar di platform seperti Facebook dan TikTok sering kali tidak memberikan gambaran yang akurat mengenai kondisi kerja yang sebenarnya. Oleh karena itu, SBMI menilai bahwa peningkatan literasi masyarakat mengenai migrasi aman dan risiko pekerjaan di sektor perikanan sangat diperlukan. Sebagai upaya pencegahan, SBMI bekerja sama dengan ILO dan Dinas Tenaga Kerja dalam program peningkatan tata kelola migrasi melalui pembentukan pusat informasi migrasi. Namun hingga saat ini, kegiatan sosialisasi tersebut baru menjangkau sekitar 15–20 desa, sehingga masih diperlukan perluasan jangkauan program agar dapat menjangkau lebih banyak masyarakat.

c. Wawancara dengan Pemerintah Desa Asemdayong

Tanggal: 2 Mei 2025

Narasumber: Nurhuda Asrori (Sekretaris Desa Asemdayong)

Wawancara dengan Pemerintah Desa Asemdayong membahas kondisi masyarakat desa yang banyak bekerja sebagai awak kapal perikanan migran serta peran pemerintah desa dalam proses administrasi keberangkatan pekerja. Berdasarkan penjelasan narasumber, pekerjaan sebagai awak kapal perikanan telah menjadi salah satu mata pencaharian yang cukup umum bagi masyarakat di wilayah pesisir Pematang. Faktor ekonomi menjadi pendorong utama masyarakat untuk bekerja di sektor tersebut, terutama karena peluang kerja lokal yang terbatas.

Pemerintah desa pada umumnya terlibat dalam proses administratif seperti penerbitan dokumen kependudukan dan surat keterangan yang diperlukan oleh calon pekerja migran. Namun dalam praktiknya, pemerintah desa sering kali tidak memiliki informasi yang lengkap mengenai proses perekrutan maupun perusahaan penempatan yang memberangkatkan pekerja. Hal ini disebabkan karena banyak proses perekrutan yang dilakukan langsung oleh perantara atau manning agency tanpa koordinasi

yang memadai dengan pemerintah desa. Selain itu, pemerintah desa juga menghadapi keterbatasan dalam melakukan pendataan terhadap warga yang bekerja di luar negeri sebagai awak kapal perikanan. Tidak semua pekerja melaporkan keberangkatan mereka kepada pemerintah desa sehingga data mengenai jumlah pekerja migran dari desa tersebut sering kali tidak akurat. Kondisi ini menyulitkan pemerintah desa ketika harus memberikan bantuan atau melakukan penanganan apabila terjadi permasalahan yang dialami oleh pekerja di luar negeri.

Dalam diskusi juga disampaikan pentingnya peningkatan koordinasi antara pemerintah desa, lembaga pemerintah terkait, serta organisasi masyarakat sipil agar informasi mengenai migrasi aman dapat lebih mudah diakses oleh masyarakat. Pemerintah desa juga diharapkan dapat berperan dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai prosedur keberangkatan yang aman serta risiko yang mungkin dihadapi oleh pekerja migran di sektor perikanan.

d. FGD dengan Pejuang Suara Pelaut (PSP) Pemalang

Tanggal: 18 September 2025

**Narasumber: Perwakilan Pejuang Suara Pelaut (PSP)
Pemalang**

Diskusi dengan Pejuang Suara Pelaut (PSP) Pemalang membahas berbagai upaya yang dilakukan organisasi masyarakat sipil dalam meningkatkan perlindungan bagi awak kapal perikanan migran. PSP merupakan organisasi yang aktif melakukan kegiatan sosialisasi dan pendampingan kepada awak kapal mengenai hak dan kewajiban mereka selama bekerja di sektor perikanan.

Dalam kegiatan sosialisasi, PSP berupaya memberikan pemahaman kepada calon awak kapal mengenai risiko pekerjaan di sektor perikanan, termasuk potensi eksploitasi tenaga kerja. Namun organisasi ini tidak secara langsung menangani seluruh kasus yang terjadi. Dalam beberapa situasi, PSP akan merujuk kasus kepada lembaga terkait seperti BP3MI atau instansi pemerintah lainnya yang memiliki kewenangan dalam penyelesaian kasus pekerja migran. PSP juga melakukan kegiatan pendataan melalui kunjungan ke tempat tinggal atau mess awak kapal perikanan untuk mengumpulkan informasi mengenai kondisi pekerja. Pendataan

tersebut dilakukan dengan pendekatan by name by address untuk memperoleh gambaran yang lebih akurat mengenai jumlah dan kondisi pekerja. Berdasarkan kegiatan tersebut, PSP telah melakukan wawancara dengan sekitar 400 awak kapal perikanan.

Selain itu, PSP juga memiliki rencana untuk membentuk Fishery Center, yaitu pusat layanan pengaduan bagi awak kapal perikanan yang mengalami permasalahan selama bekerja. Inisiatif ini diharapkan dapat menjadi sarana bagi pekerja untuk melaporkan berbagai bentuk pelanggaran yang mereka alami serta memperoleh informasi mengenai mekanisme penanganan kasus. Dalam diskusi juga dibahas pentingnya kolaborasi antara organisasi masyarakat sipil, pemerintah, dan media dalam meningkatkan kesadaran publik mengenai isu eksploitasi tenaga kerja di sektor perikanan. Media sosial dinilai memiliki peran penting dalam menyebarkan informasi kepada masyarakat, mengingat banyak calon pekerja yang memperoleh informasi pekerjaan melalui platform digital.

**e. FGD dengan International Organization for Migration (IOM)
Indonesia**

Tanggal: 16 Oktober 2025

Narasumber: Perwakilan IOM Indonesia (M. Yasser dan Sarah Astried)

FGD dengan perwakilan IOM Indonesia membahas berbagai program dan pendekatan yang dilakukan organisasi internasional dalam mendukung perlindungan pekerja migran, termasuk awak kapal perikanan. Dalam diskusi ini disampaikan bahwa perlindungan pekerja migran memerlukan pendekatan yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, organisasi masyarakat sipil, hingga komunitas lokal. IOM menekankan pentingnya peningkatan kesadaran masyarakat mengenai migrasi aman serta risiko yang berkaitan dengan praktik perekrutan yang tidak transparan. Salah satu pendekatan yang dilakukan adalah melalui kegiatan edukasi dan peningkatan kapasitas bagi masyarakat di daerah kantong pekerja migran.

Selain itu, IOM juga menyoroti pentingnya penguatan sistem pendataan pekerja migran agar pemerintah dapat memiliki informasi yang lebih akurat mengenai jumlah dan kondisi pekerja yang bekerja di luar negeri. Data yang akurat dianggap penting untuk mendukung proses perlindungan pekerja serta penanganan

kasus apabila terjadi pelanggaran hak-hak pekerja migran. Dalam diskusi ini juga dibahas peluang kolaborasi antara organisasi internasional, lembaga pemerintah, dan organisasi masyarakat sipil dalam memperkuat mekanisme perlindungan pekerja migran di tingkat lokal maupun nasional.